



	NOMOR SOP	: POM-05.03/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01
	TGL. PEMBUATAN	: 22 JUNI 2018
	NO & TGL. REVISI	: 05/ 13 JUNI 2022
	TGL. EFEKTIF	: 13 JUNI 2022
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;"> <p>KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG</p>  <p>Sukriadi Darma, S.Si., Apt.</p> </div>
NAMA SOP	: PELAKSANAAN PENYIDIKAN	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) 2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) 	Memiliki pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan serta memiliki kualifikasi yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik penindakan; 2. Teknik olah TKP; 3. Teknik pemeriksaan tersangka/saksi dan ahli; 4. Penyusunan administrasi penyidikan; dan 5. Perencanaan dan analisis penyidikan 	

5. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072)
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781)
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867)
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424)
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2004.
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.
12. Keputusan Bersama MenKes dan MenPAN Nomor 264A/Menkes/SKB/VI/2003 dan Nomor

<p>02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri</p> <p>15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 05018/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<p>1. POM-05.04/CFM.01/SOP.01 OPERASI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamera 2. Kendaraan 3. Alat Tulis 4. Komputer 5. Peralatan / Perlengkapan lain.
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Lakukan kegiatan operasi / penindakan sesuai dengan IK sehingga proses penyidikan sesuai dengan ketentuan dan berjalan dengan lancar.</p>	<p>Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.</p>



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.03/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 4 dari 13

A. Diagram Alir

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Tim Penguji	Kepala BBPOM Di Bandung	Koordinator Kelompok Substansi Penindakan	Tim Petugas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat Surat Perintah					Laporan Kejadian	1 HK	Sprint Penyidikan Sprint Tugas Sprint Penggeledahan Sprint Penyitaan Sprint Penyisihan BB Sprint Penyegelan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada kasus mudah dapat dilaksanakan oleh 2 orang PPNS - Pada kasus sedang dapat dilaksanakan oleh 3 orang PPNS - Pada kasus sulit dapat dilaksanakan oleh 4 orang PPNS - Pada kasus sangat sulit dilaksanakan tim beranggotakan minimal 5 orang PPNS
2.	Membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)					- Laporan Kejadian - Sprint Penyidikan	1 HK	SPDP	
3.	Membuat Surat Izin Khusus Penggeledahan					- Laporan Kejadian - Sprint Penyidikan	1 HK	- Surat permohonan Izin Khusus Penggeledahan - Izin Penggeledahan	Dilakukan sesuai dengan KUHAP Apabila diperlukan
4.	Membuat Surat Izin Khusus Penyitaan					- Laporan Kejadian - Sprint Penyidikan		- Surat permohonan Izin Khusus Penyitaan - Izin Penyitaan	Dilakukan sesuai dengan KUHAP Apabila diperlukan
5.	Melakukan Pemeriksaan di TKP					- Surat Perintah Tugas - Surat Perintah Penyidikan	2 HK	BA Pemeriksaan TKP	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
6.	Melakukan Penggeledahan					- Surat Perintah Penggeledahan - Surat mohon	2 HK	Berita Acara Penggeledahan	Dilakukan sesuai dengan KUHAP



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.03/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 5 dari 13

						Bantuan Pengeledahan			
7.	Melakukan Penyitaan Barang Bukti					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Penyitaan - Surat mohon Bantuan Penyitaan 	2 HK	Berita Acara Penyitaan	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
8.	Melakukan Penyisihan Barang Bukti					<ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah Penyidikan - Surat Perintah Penyisihan 	2 HK	Berita Acara Penyisihan Barang Bukti	Dilakukan sesuai dengan KUHAP Apabila diperlukan
9.	Melakukan Penyegelelan dan Pembungkusan Barang Bukti					<ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah Penyidikan - Surat Perintah Penyegelelan dan Pembungkusan Barang Bukti 	2 HK	Berita Acara Penyegelelan dan Pembungkusan Barang Bukti	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
10.	Melakukan penerimaan barang bukti dari Pemilik / penguasa barang					<ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah Penyidikan - Berita Acara Penyitaan 	2 HK	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPB)	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
11.	Melakukan Penitipan Barang Bukti					<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Penyitaan - Permohonan penitipan BB 	2 HK	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penitipan BB (ke RUPBASAN) - Berita Acara Penitipan BB 	Dilakukan sesuai dengan KUHAP Apabila diperlukan
12.	Melakukan Pengambilan Penitipan Barang Bukti					<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Penitipan BB 	2 HK	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pengambilan Penitipan BB 	Dilakukan sesuai dengan KUHAP Apabila diperlukan
13.	Melakukan Pemanggilan terhadap saksi dan tersangka					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Penyidikan 	2 HK	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Panggilan Saksi - Surat Panggilan Tersangka 	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
						-		-	



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.03/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 6 dari 13

14.	Menyerahkan SPDP ke Kejati dan Tersangka				□	- SPDP - Surat Perintah Penyidikan	7 Hari	SPDP	
15.	Meminta persetujuan penggeledahan dan penyitaan ke PN Setempat				↓	- Laporan Kejadian - Surat Perintah Penyidikan	2 HK	- Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan	Dalam hal tertangkap tangan
					↓	- SPDP - BA Penggeledahan - BA Penyitaan - STPB - Resume Singkat		- Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan - Resume Singkat - Penetapan Persetujuan Penggeledahan - Penetapan Persetujuan Penyitaan	
16.	Melakukan Pemusnahan Barang Bukti				↓	- Surat perintah Penyidikan - Surat Perintah Pemusnahan - Berita Acara Pemusnahan	2 HK	- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti - Berita Acara Saksi - Surat Pernyataan Tersangka	Dilakukan sesuai dengan KUHAP Apabila diperlukan
17.	Menyerahkan barang bukti untuk diuji	□ ←			↓	- Berita Acara Penyisihan - Surat pengiriman sampel BB	1 HK	Laporan Hasil Pengujian	Apabila diperlukan
18.	Permintaan Bantuan Ahli				↓	- Surat Perintah Penyidikan - Surat Permintaan Bantuan Ahli	1 HK	Surat Permintaan Bantuan Ahli	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
19.	Melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi				↓	- Surat Perintah Penyidikan - Berita Acara Pemeriksaan	2 HK	- Berita Acara Pemeriksaan Saksi - Berita Acara Pengambilan Sumpah	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
					↓	-		-	



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.03/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 7 dari 13

20.	Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka					- Surat Perintah Penyidikan - Berita Acara Pemeriksaan	2 HK	- Berita Acara Pemeriksaan Ahli - Surat Penunjukan Penasehat Hukum - Surat Pernyataan	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
21.	Melakukan Pemeriksaan Terhadap Ahli					- Surat Perintah Penyidikan - Berita Acara Pemeriksaan	1 HK	- Berita Acara Pemeriksaan Ahli - Berita Acara Pengambilan Sumpah	Dilakukan sesuai dengan KUHAP
22.	Membuat daftar saksi					- Berita Acara Pemeriksaan Saksi	1 HK	Daftar Saksi	
23.	Membuat daftar Ahli					- Berita Acara Pemeriksaan Ahli		Daftar Ahli	
24.	Membuat daftar Tersangka					- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka		Daftar Tersangka	
25.	Membuat Daftar Barang Bukti					- Berita Acara Penyitaan		Daftar Barang Bukti	
26.	Membuat Resume, apakah memenuhi unsur pasal atau tidak?					- BAP Saksi - BAP Ahli - BAP Tersangka - Barang Bukti	2 HK	- Resume	Apabila tidak memenuhi unsur pasal dikeluarkan SP3
27.	Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan					- Resume - Hasil Gelar Kasus - Surat Perintah Penghentian Penyidikan - Ketetapan Penghentian Penyidikan	1 HK	Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)	
						-			



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.03/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 8 dari 13

28.	Membuat sampul Berkas Perkara					- BAP Tersangka	1 HK	Sampul Berkas Perkara	
29.	Membuat daftar isi berkas perkara					- Surat Perintah Penyidikan			Daftar Isi Berkas Perkara
30.	Menyusun berkas perkara					- Output Penyidikan	1 HK	Berkas Perkara	
31.	Melakukan Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara					- Berkas Perkara	N/A	Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara	

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundangan
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah Surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Bandung
3. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila pada sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.04/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 9 dari 13

4. Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan
5. Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada Terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
6. Alat Bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa
7. Kriteria penanganan kasus mudah terdapat pada pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
8. Kriteria penanganan kasus sedang terdapat pada pasal 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
9. Kriteria penanganan kasus sulit terdapat pada pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
10. Kriteria penanganan kasus sangat sulit terdapat pada pasal 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

C. Pihak yang Terkait

1. Kepala BBPOM Bandung.
2. Koordinator Kelompok Substansi Penindakan
3. Tim Petugas PPNS BBPOM Bandung



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.04/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 10 dari 13

D. Formulir yang Digunakan

1. Surat Perintah Tugas
2. Surat Perintah Penyidikan
3. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
4. Permintaan Izin/Izin Khusus Penggeledahan
5. Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan
6. Permohonan Bantuan Polisi
7. Surat Perintah Penggeledahan
8. Surat Perintah Penyitaan
9. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti
10. Surat Perintah Penyegelehan Dan Atau Pembungkusan Barang Bukti
11. Berita Acara Pemeriksaan di TKP
12. Permintaan Bantuan Penggeledahan
13. Berita Acara Penggeledahan
14. Permintaan Bantuan Penyitaan
15. Berita Acara Penyitaan
16. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
17. Surat Pengujian Dalam Rangka Penyidikan
18. Berita Acara Penyegelehan Dan Atau Pembungkusan Barang Bukti
19. Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti
20. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
21. Berita Acara Penitipan Barang Bukti
22. Surat Panggilan Saksi
23. Surat Panggilan Tersangka



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.04/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 11 dari 13

24. Surat Permintaan Bantuan Ahli
25. Permintaan Persetujuan Pengeledahan
26. Permintaan Persetujuan Penyitaan
27. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi)
28. Berita Acara Pengambilan Sumpah (Saksi)
29. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka)
30. Surat Penunjukkan Penasehat Hukum
31. Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
32. Berita Acara Pemeriksaan (Konfrontasi)
33. Berita Acara Pengambilan Sumpah (Ahli)
34. Berita Acara Pemeriksaan (Ahli)
35. Daftar Saksi
36. Daftar Ahli
37. Daftar Tersangka
38. Daftar Barang Bukti
39. Resume
40. Sampul Berkas Perkara
41. Daftar Isi Berkas Perkara
42. Permohonan Penitipan Barang Bukti
43. Berita Acara Penitipan Barang Bukti
44. Permohonan Pengambilan Penitipan Barang Bukti
45. Berita Acara Pengambilan Penitipan Barang Bukti
46. Pelimpahan Penyidikan An Tersangka
47. Berita Acara Pelimpahan Penyidikan



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.04/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 12 dari 13

48. Permohonan Persetujuan Pemusnahan
49. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti
50. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti
51. Surat Perintah Penghentian Penyidikan
52. Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan
53. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
54. Permintaan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi
55. Permintaan Bantuan Penangkapan
56. Permintaan Bantuan Penahanan
57. Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan
58. Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan
59. Form Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara Tahap I

E. Output yang Dihasilkan

1. Berkas Perkara



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.04/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENYIDIKAN

HALAMAN : 13 dari 13

F. Bagan Subproses Bisnis

